

EVALUASI PENYUSUNAN DAN PENYJIAN LAPRAN KEUANGN PDA
USAHAA MIKRO KECIL MENENGAH KERIPIK TEMPE SARI RASA

SKRIPSI



OLEH :

IMAM MAULANA

NIM. 2016110081

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2020

RINGKASAN

Usaha kecil dan menengah adalah merupakan suatu bentuk usaha yang mempunyai peluang besar dalam proses mewujudkan pengembangan usaha untuk memberikan kontribusi ditengah tengah masyarakat sekitar. Pada dasarnya usaha kecil menengah saat ini masih banyak yang menggunakan sistem yang sederhana dalam pengelolaan laporan keuangan, sehingga perlu adanya upaya dalam perbaharuan sistem pelaporan keuangan tersebut dan terus menerus dilakukan perbaikan untuk memenuhi tujuan dan terciptanya sistem yang lebih baik bagi pemilik entitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan dan penyajian laporan keuangan UMKM keripik tempe “Sari Rasa”

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan paradigma interpretatif. Teknik Pengumpulan Data adalah dengan melakukan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sedangkan untuk Teknik analisa data adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dan untuk menguji keabsahan data menggunakan Triangulasi sumber data, dan Triangulasi metode.

Hasil evaluasi penyusunan keuangan yang diterapkan di UMKM keripik tempe Sari Rasa dapat diketahui bahwa UMKM Keripik tempe sari rasa belum menerapkan penyusunan laporan keuangan secara lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemilik usaha keripik tempe hanya melakukan pencatatan penerimaan saat terjadi transaksi penjualan dan pengeluaran saat terjadi biaya-biaya untuk kelancaran operasional usahanya. Maka dari itu peneliti membantu mengerjakan penyusunan laporan keuangan sederhana supaya membantu pemilik usaha keripik tempe untuk mengetahui laba usaha setiap bulannya.

Kata Kunci: Penyusunan, Penyajian, Laporan Keuangan, UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pelaku UMKM saat ini sudah banyak bermunculan terlihat dari aktivitas sehari-hari tidak pernah lepas dari berbagai pelayanan dan barang yang dihasilkan dari kreativitas pelaku UMKM. UKM tidak hanya memberikan layanan secara tradisional dalam melakukan transaksi dengan konsumen namun, pelaku UMKM di era digital saat ini juga menggunakan sistem pemasaran produknya secara Online. jumlah unit UMKM yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa jumlah unit UKM di Indonesia hampir mencapai 67 juta. Hal itu terbukti pada tahun lalu UKM di Indonesia mampu memberikan kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) berkisar 60% atau sebesar Rp.4.800 Triliun. Sedangkan di daerah malang UMKM dari sejak tahun 2015 sampai saat ini mencapai 116 pelaku UKM. Oleh karena itu dalam langkah mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri serta modern, dan tetap mempertahankan UMKM karena terbukti UKM mampu menjaga kestabilan ekonomi dan menjadi pondasi perekonomian indonesia bahkan saat terjadi krisis moneter (Suhendri, et.al, 2017).

Melihat pesatnya perkembangan UMKM di Indonesia perlu adanya aturan yang lebih sederhana dan cepat dipahami oleh pelaku UMKM, maka Dewan Standar Akuntansi IAI telah menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dari SAK ETAP yaitu SAK-EMKM. Dengan disetujui dan disahkannya SAK EMKM, standart keuangan yang ada di Indonesia ini nantinya akan menjadi lebih efektif dan memberikan lebih banyak kemudahan dalam penyusunan pelaporan keuangan khususnya di UKM, Oleh sebab itu dengan hadirnya SAK-EMKM, UKM tidak lagi dipersulit untuk membuat laporan keuangan dengan menerapkan PSAK

yang berlaku umum seperti IFRS dan SAK-TAP dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sehingga adanya penyederhanaan SAK-EMKM seperti mikro, kecil menengah nantinya bisa menyusun laporan yang lengkap dengan standar-standar yang sudah diberlakukan dan menjadi ketentuan oleh Dewan Standar Akuntansi IAI.

Sesuai dengan Regulasi di ruang lingkup SAK-EMKM ini, maka Standar yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi adalah diperuntukkan bagi pelaku entitas tanpa akuntabilitas publik, yang dimaksud entitas tanpa akuntabilitas publik disini adalah entitas yang belum mempunyai akuntabilitas public yang signifikan, serta tidak untuk mengeluarkan laporan keuangan dengan tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditur, serta lembaga pemerintah.

UKM adalah merupakan suatu bentuk usaha yang mempunyai peluang besar dalam proses mewujudkan pengembangan usaha untuk memberikan kontribusi ditengah tengah masyarakat sekitar. Pada dasarnya usaha kecil menengah ini saat masih banyak yang menggunakan sistem yang sederhana dalam pengelolaan laporan keuangan, sehingga perlu adanya upaya dalam perbaharuan sistem pelaporan keuangan tersebut, dan terus menerus dilakukan perbaikan untuk memenuhi tujuan dan terciptanya sistem yang lebih baik bagi pemilik entitas.. Selain itu, Usaha kecil dan menengah saat ini juga tidak begitu maksimal dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan dikarenakan adanya keterbatasan pemilik entitas dalam melakukan hal tersebut faktor yang memicu diantaranya minimnya edukasi terkait proses sistem penyusunan pencatatan pelaporan yang baik dan benar serta minimnya pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya menerapkan akuntansi dengan lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi pelaku UMKM (Suhendri, et.al, 2018).

Kewirausahaan yang dilakukan oleh EMKM mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi, masih banyak ditemukan khususnya di UMKM belum mampu membuat pencatatan, pembukuan bahkan pelaporan keuangan. padahal dalam membuat pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan dalam menjalankan Usaha sangat penting dan harus

dilakukan oleh setiap entitas, supaya entitas setiap tahun dapat mengevaluasi kinerja sebuah entitas. Selain itu, entitas juga dapat meningkatkan modal kerja dari bank dalam bentuk pinjaman dengan melampirkan laporan keuangan entitas. Setiap tahun dapat mengevaluasi kinerja entitas. Selain itu, entitas juga dapat meningkatkan modal kerja dari bank dalam bentuk pinjaman dengan melampirkan laporan keuangan entitas. (Nina 2018).

Berdasarkan riset yang pernah dilakukan selalu menemukan bahwa banyak pelaku UMKM belum bisa menyusun laporan keuangan dengan benar dan baik. hal itu, karena standar akuntansi terlalu sulit sehingga belum bisa diterapkan oleh pelaku UMKM. Oleh sebab itu, Dewan Standar Akuntansi memberlakukan SAK-EMKM dalam memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM, serta memudahkan bagi pelaku UMKM untuk menambah modal kerja dari pinjaman pihak perbankan dengan menunjukkan laporan keuangan dari Entitas. Masalah muncul kembali karena faktor SDA yang masih memiliki Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar seringkali mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan terlebih-lebih dalam perencanaan keuangan serta kurangnya keterampilan menghasilkan sistem akuntansi yang tidak teratur bagi pemilik UMKM. Maka dengan demikian peneliti mengambil judul “Evaluasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada UMKM Keripik Tempe Sari Rasa”

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik dalam merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada UMKM Keripik Tempe Sari Rasa?

1.3 **Tujuan penelitiann**

Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud di dalam penelitian ini, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada UMKM Keripik Tempe Sari Rasa

1.4 **Manfaat penelitian**

1. Bagi peneliti

Manfaat untuk peneliti adalah untuk mengetahui sistem pencatatan di sebuah UMKM dan sebagai pengaplikasian ilmu yang telah peneliti peroleh di kampus serta menambah wawasan bagi peneliti dalam pengelolaan keuangan

2. Bagi UMKM

Penelitian ini nantinya sebagai referensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan supaya semakin bagus untuk megatahui perkembangan usaha kedepannya.

3. Bagi pihak lain

Untuk dijadikan bahan refrensi dalam penelitian yang akan dilakukan dimasa depan dan untuk memberikan gambaran bagaimana melakukan sebuah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Devany, Ayu Marsya (2017) Dengan Judul *Analisis Kebermanfaatn Sistem Informasi Akuntansi Yang Dapat Menghasilkan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM) Pada UMKM Dengan Omzet Kecil (Studi Kasus Pada UMKM ARA)*
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Afabeta
- Ivana Nina Esterlin, Andi Indalagiy, Danna Solihin(2018) Dengan Judul *Implementasi SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah) Pada UMKM Borneo Truck Food Truck Samarinda Community*
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan akuntansi indonesia (2013). *Standar akuntansi keunagan entitas tanpa akuntabilitas publik*. Jakarta: ikatan akuntansi indonesia.
- Ikatan akuntansi indonesia. (2016). *Standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah*. jakakarta: dewan standar akuntansi keuangan indonesia.
- Kasmir (2012:2) *Analisis laporan keuangan*. Jakarta. PT. Raja Geafindo.
- Muchson, Dr. 2017. *Statistik Diskriptif*. Jakarta: Guepedia
- Munawir. (2010). *Analisis laporan keuangan*. yogyakarta: liberty.
- Newman, LW. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative*

Primayudia Doddy, Vol 6, No 2 (2017), Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Budidaya Ikan Nila Di Keramba “Sejahtera” Berbasis SAK EMKM

Raja, Oskar, Dkk. (2010). *Kiat Sukses Mendirikan Dan Mengelola UMKM*. Jakarta: El Pres.

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga: Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, CV BANDUNG, 2013

Suhendri, H., Iwan, T., Dedi. M., Zaki. B. (2017). Awareness And Perciption Of Islamic Micro-Entrepreneurs On Mudharabah Finance And Justice For Financing Access In Malang Territory indonesia, *international journal of economics and financial issues*, 2017, 7(5), 252-258.

Suhendri, H., Iwan, T., Dedi. M., Zaki. B. (2018). Evidence From: Is It True That Mudharabah Financing And Micro Business Financing Area At High Risk For Sharia Banking Business? *Journal RJOAS*, 6(78).

UU.No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Miko, Kecil Dan Menengah (UMKM)

UU.No.17 Tahun 2013 Tentang Usaha Miko, Kecil Dan Menengah

UU.No.5 Tentang Perindustrian

UU.No.9/1995 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Industry Kecil.

<https://www.malangtimes.com/amp/baca/43976/20190914/165100/90-pesen-umkm-di-kota-malang-masih-di-level-mikro-perlu-percepatan-dari-1-0-ke-4-0>.

